

## BAB II

### KONFLIK SURIAH DAN KETERLIBATAN RUSIA TAHUN 2011-2015

#### 2.1. Fenomena Arab Spring sebagai Awal dari Konflik Suriah

Pemberontakan di Suriah pada awalnya terjadi pada 2011 dimulai dengan kemunculan protes-protes yang dikarenakan kekecewaan dan ketidakpuasan rakyat terhadap rezim pemerintahan yang dianggap otoriter dan tidak demokratis sehingga ada tuntutan dari rakyat Suriah untuk melakukan reformasi pemerintahan (Houissa, 2016). Kemunculan protes-protes dalam skala kecil tersebut merupakan *spillover effect*<sup>1</sup> dari adanya fenomena Arab Spring atau pergerakan protes-protes terhadap pemerintah, dan kemudian Arab Spring itu sendiri pada awalnya terjadi di Tunisia pada tahun 2010, memberikan pengaruh terhadap konstelasi perpolitikan negara-negara Arab seperti Mesir, Yaman, Libya, dan Suriah.

Protes tersebut pada awalnya ditanggapi oleh Presiden Suriah, Bashar Al Assad, sebagai protes yang tidak akan menjadi problematik untuk kelangsungan negaranya dan sebagai pemimpin negara, Bashar Al Assad sudah sangat yakin bahwa Suriah mampu mengatasi segala bentuk protes tersebut (Darwisheh, 2014). Terinspirasi dari Mesir dan Tunisia yang dapat dikatakan berhasil dalam

---

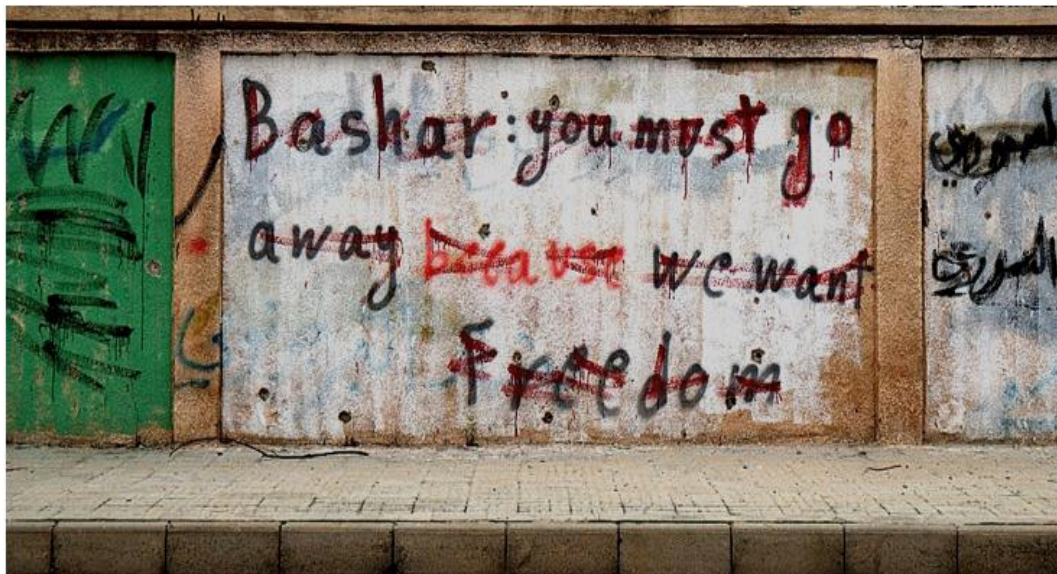
<sup>1</sup> *Spillover effect* adalah suatu persebaran sebuah fenomena atau peristiwa dari satu tempat ke tempat lain yang jaraknya berdekatan.

menyelesaikan konflik internal di negaranya, Bashar Al Assad begitu yakin dengan apa yang disampaikan.

Namun, protes-protes yang disampaikan dalam skala kecil tersebut kemudian berbalik dari ekspektasi Bashar Al Assad. Protes-protes tersebut justru semakin membesar. Dalam upayanya untuk mengatasi protes-protes yang berujung pada konflik tersebut, Bashar Al Assad pun mengeluarkan Hukum Darurat Suriah yang berisi tentang pelarangan *public protest* (Al Saleh, 2013). Bentuk-bentuk dari protes anti-pemerintah pada awalnya hanya sebatas ucapan-ucapan dan grafiti sebagai ungkapan kekecewaan masyarakat terhadap rezim.

#### Gambar 2.1.

#### Contoh Tulisan Kekecewaan Masyarakat terhadap Presiden Assad



Sumber: [www.periodismohumano.com](http://www.periodismohumano.com) 2013

Berangkat dari permasalahan grafiti yang dibuat oleh murid-murid sekolah di Kota Deera sebagai kekecewaan karena pemerintahan yang tidak demokratis, kemudian muncul protes-protes yang menjadi semakin meluas dalam skala nasional. Pemrotes bergabung dan secara terang-terangan melakukan demonstrasi menentang kekuasaan pemerintah. Pasukan keamanan pun bertindak dengan melakukan penyerangan terhadap para demonstran (Adams, 2015). Peristiwa tersebut lah yang kemudian semakin memicu konflik. Seperti sebuah siklus, semakin demonstran melawan, semakin besar upaya pasukan keamanan untuk melakukan tindakan represif, semakin besar pula kebencian-kebencian dan propaganda yang disebar oleh pemrotes terhadap pemerintah (Al Saleh, 2013).

## **2.2. Situasi Politik di Suriah**

Berangkat dari alasan-alasan pemicu terjadinya konflik yang dilatar belakangi oleh ketidakpuasan dan kebencian rakyat Suriah, maka ada baiknya perlu dipahami bagaimana proses politik yang dilaksanakan di bawah rezim Al Assad.

### **2.2.1 Suriah setelah Kemerdekaan**

Setelah memperoleh kemerdekaannya dari Perancis di tahun 1946, kemudian pada tahun 1958 Suriah bersama dengan Mesir bergabung untuk membentuk kesatuan negara Arab yang dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser dari Mesir. Akan tetapi, penyatuan antara kedua negara tersebut tidak dapat bertahan lama. Pada tahun 1961, terjadi kudeta militer Suriah

yang pada akhirnya membuat Suriah berhasil mendirikan negaranya sendiri ([guides.library.cornell.edu](http://guides.library.cornell.edu))

Setelah peristiwa tersebut, Suriah mengalami kekosongan pemerintahan pusat. Akibatnya, banyak persaingan-persaingan dari fraksi militer yang bertujuan untuk melakukan suksesi militer dan mencapai kekuasaan tinggi. Namun, pada tahun 1970, Hafez Al Assad (ayah Bashar Al Assad) yang berasal dari Partai Baath, berhasil mendapatkan kedudukannya untuk menjadi pemimpin Suriah dan menyelenggarakan semua aktivitas politik negara (Hinnebuch, 2011). Partai Baath merupakan partai di Suriah yang berbasis sosialisme (Macfarquhar, 2000).

Hafez Al Assad membangun tiga pilar politik yang cenderung *overlap* yakni; 1) semua pejabat negara berasal dari Partai Baath, 2) pembentukan militer dan kepolisian sebagai satu unit kesatuan dan, 3) birokrasi yang berlandaskan keagamaan. Hal ini membuat sistem pemerintahan di Suriah cenderung *interlocked*, maksudnya, sistem politik di Suriah pada masa itu hanya dikontrol oleh Partai Baath yang menjadikan agama sebagai pondasi birokrasi; dan unit kesatuan keamanan sebagai badan pengawas masyarakat dimana hal ini cenderung membuat pemerintahan di Suriah lebih tertutup secara internal (Hinnebusch 2011).

### **2.2.2. Suksesi Hafez Al Assad oleh Bashar Al Assad**

Setelah Hafez Al Assad wafat, kepemimpinan diteruskan oleh putranya, Bashar Al Assad. Hal ini dikarenakan bahwa sistem politik dan

kekuasaan Suriah yang bersifat klan atau turun-temurun oleh suatu keluarga membuat pemerintahan Suriah tidak jatuh ke tangan orang lain. Oleh sebab itu, Hafez Al Assad memberikan estafet kekuasaannya kepada Bashar Al Assad.

Bashar Al Assad memenangkan referendum sebanyak 97,29 persen (Kuncahyono, 2012) dan mulai menjabat sebagai presiden Suriah menggantikan ayahnya setelah hari pelantikannya yaitu 17 Juli 2000 ([www.hrw.org](http://www.hrw.org)). Untuk melangsungkan kepemimpinannya, Bashar Al Assad memilih untuk memfokuskan pada pembangunan, keamanan dan pertahanan negaranya melalui sektor militer dengan membentuk Militer Suriah. Semua ini dilakukan untuk mencegah adanya konflik yang dapat muncul secara sektarian (Holliday, 2013).

### **2.2.3. Kedekatan dengan Rusia**

Rusia merupakan negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Suriah pada tahun 1946. Kedekatan Suriah dan Rusia semakin meningkat pada waktu Suriah masih berada di bawah kepemimpinan Hafez Al Assad dan Michael Gorbachev yakni pada tahun 1970 (Robins-Early, 2017).

Kerja sama yang dilakukan oleh Suriah dengan Rusia yang sebelumnya bernama Uni Soviet, lebih menekankan pada aspek militer. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Pertahanan oleh kedua negara pada 08 Oktober 1980 (Robins-Early, 2017). Pemerintahan Hafez

Al Assad yang memfokuskan pada keamanan nasional, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Hafez Al Assad mencapai kekuasaan dengan berangkat dari upaya penaklukan dan persaingan yang dilakukan dengan fraksi-fraksi militer lain. Itu sebabnya ancaman untuk keamanan nasional yang paling mungkin dihadapi Suriah adalah ancaman militer. Walaupun Partai Baath telah mencapai kekuasaannya, namun bukan berarti ancaman tersebut secara otomatis menghilang.

Oleh sebab itu, kerja sama militer dengan Kremlin dalam bidang militer dilakukan semata-mata untuk memperkuat keamanan internal Suriah itu sendiri. Hal ini dikarenakan Rusia dan Suriah merupakan *partner geostrategic* yang saling menguntungkan sebab Rusia menjadi menjadikan Suriah sebagai penghalang dari pengaruh Amerika Serikat di negara-negara Timur Tengah lain seperti Arab Saudi dan Turki.

Selama Perang Dingin berlangsung, hubungan Suriah-Uni Soviet menjadi semakin erat karena fokus Soviet pada saat itu adalah untuk men-*challenge* kekuatan militer Amerika Serikat dan menjadi hegemon global (Gaub dan Popescu, 2013). Suriah merupakan *strategic partner* bagi Uni Soviet yang juga menjadi tameng dari persebaran superioritas Israel yang di *back-up* oleh Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Hubungan Suriah dan Uni Soviet tetap berjalan dengan baik hingga runtuhnya Uni Soviet dan berganti nama menjadi Rusia.

Pada tahun 2000, dibawah pemerintahan Vladimir Putin dan Bashar Al Assad, hubungan Rusia dengan Suriah kembali erat. Hal ini ditunjukkan oleh pertemuan Bashar Al Assad dengan Vladimir Putin yang mengagendakan pembatalan hutang Suriah sebesar 73% pasca Soviet dilanjutkan dengan pembangunan markas angkatan laut Rusia di Tartus pada tahun 2008 ([www.sbs.com.au](http://www.sbs.com.au)). Kemudian, pertemuan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak ekspor persenjataan dan perlengkapan militer dari Rusia ke Suriah (Caro).

Rusia dan Suriah selalu berupaya meningkatkan hubungan kerja sama antar kedua belah pihak. Kerja sama tersebut memiliki makna sebagai upaya pengeratan hubungan aliansi dan menjadikan Suriah sebagai sekutu Rusia di Timur Tengah yang dapat diandalkan khususnya dalam bidang penjualan perlengkapan militer. Terlepas dari hal tersebut, hubungan Rusia dan Suriah juga masih tetap dalam keadaan baik bahkan setelah pecahnya konflik internal Suriah dimana pihak oposisi menginginkan kemunduran Bashar Al Assad.

### **2.3. Konflik Suriah**

Konflik Suriah pertama kali dipicu oleh sebuah protes. Protes tersebut berawal dari grafiti di dinding sekolah yang digambar oleh 15 anak-anak sekolah di kota Deraa yang berusia diantara 10-15 tahun yang bertuliskan “*eskaat el nizam*” yang artinya, rakyat ingin menurunkan rezim. Hal ini membuat anak-anak

tersebut ditahan oleh pemerintah karena mereka dianggap bertanggung jawab atas tulisan grafiti tersebut. Inilah yang menjadi penyebab kemarahan keluarga dari anak-anak tersebut hingga pada akhirnya berujung pada kemarahan seluruh penjuror masyarakat (Kuncahyono, 2012). Protes-protes keras rakyat terhadap pemerintah pun mulai bermunculan untuk menentang kediktatoran dan penangkapan yang dianggap tidak sewajarnya oleh Pemerintah Rezim Bashar Al Assad di Kota Daraa (Haran, 2016).

Protes-protes tersebut pada awalnya tidak dimaksudkan untuk menentang rezim pemerintah. Masyarakat masih memberikan penilaian yang baik terhadap Rezim Bashar Al Assad. Protes-protes tersebut hanyalah sebatas tuntutan pembebasan terhadap 15 siswa yang ditangkap oleh pemerintah. Penangkapan terhadap 15 siswa dianggap oleh masyarakat Suriah sebagai hal yang tidak lazim untuk dilakukan oleh pemerintah yang seharusnya melindungi bangsanya (Sterling, 2012).

Protes-protes yang dianggap sebagai hal biasa oleh pemerintah Suriah itu pun kemudian berubah menjadi demonstrasi dalam skala besar hingga meluas ke Kota Damaskus, ibukota Suriah, sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kekuasaan rezim dan ketidakpuasan masyarakat di bawah kepemimpinan Bashar Al Assad ([www.hrw.org](http://www.hrw.org)). Demonstrasi tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Suriah dengan melakukan tindakan yang koersif atau dengan pemaksaan yang bertujuan untuk meredam masyarakat dengan menurunkan pasukan keamanan (Arar, 2011).



Pergerakan demonstrasi yang telah menjadi pergerakan yang terkoordinasi secara nasional tersebut membuat Pemerintah Suriah semakin memanfaatkan kekuatan militer yang dimiliki untuk menekan aspirasi dan aksi masyarakat. Penembakan, penghilangpaksaan, pembunuhan dan penyiksaan yang berujung pada kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melumpuhkan massa namun massa tetap saja melanjutkan protes dan tuntutan terhadap pemerintah hingga tuntutan untuk menggulingkan rezim Bashar Al Assad (McEvers, 2012)

Hingga April 2013, kurang lebih penduduk sipil yang meninggal telah mencapai angka yang masif. Menurut PBB, hingga Juli 2015, jumlah masyarakat sipil yang meninggal akibat dari tindakan represif pemerintah yang berujung pada kekerasan telah mencapai jumlah 250,000 jiwa lebih dari demonstran yang secara terang-terangan menentang rezim ([www.bbc.com](http://www.bbc.com)). Dan terakhir, sebelum PBB menghentikan penghitungan, hingga tahun 2015 korban meninggal di Suriah telah mencapai 470,000 jiwa ([www.tempo.com](http://www.tempo.com)).

#### **2.4. Aktor-aktor Internal dalam Perang Sipil Suriah**

Adapun aktor-aktor internal yang terlibat dalam konflik dan perang sipil di Suriah terbagi ke dalam dua aktor yakni kelompok pemerintah (rezim) dan kelompok oposisi ([www.cbc.ca](http://www.cbc.ca)).

#### **2.4.1. Kelompok Pemerintah (Rezim Bashar Al Assad)**

Kelompok ini merupakan kelompok pemerintah maupun yang pro-pemerintah. Rezim Bashar Al Assad telah berkuasa di Suriah sejak tahun 2000. Sebelumnya, Suriah dipimpin oleh ayah dari Bashar Al Assad, yaitu Hafez Al Assad. Keluarga Al Assad yang sejak tahun 1970 menjadi keluarga yang memegang dominasi di Suriah tersebut masih dianggap oleh masyarakat pro-pemerintah sebagai pembentuk identitas Suriah sebagai negara yang besar di kawasan Timur Tengah. Oleh sebab itu, kelompok ini menganggap bahwa mempertahankan pemerintahan di bawah Bashar Al Assad merupakan sesuatu yang bersifat esensial dan ketaatan terhadap rezim diasumsikan sebagai bentuk loyalitas terhadap negara.

Bermula dari tulisan grafiti di dinding sebuah sekolah di Kota Deera yang telah dijelaskan sebelumnya hingga menyebabkan anak-anak tersebut ditahan karena dianggap bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, popularitas Bashar Al Assad semakin rendah di hadapan masyarakat Suriah. Terlebih lagi dengan asumsi bahwa Bashar Al Assad berasal dari Keluarga Al Assad, yang telah menjadi keluarga penguasa Suriah sejak tahun 1970.

Dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat kepada pemerintah, selain dengan tindakan represif, konspirasi-konspirasi pun mulai dihembuskan sebagai justifikasi dari aksi pemerintah. Konspirasi-konspirasi tersebut berupa pemberitaan adanya ancaman dari kelompok

bersenjata dan organisasi terorisme yang dapat mengancam stabilisasi politik Suriah serta adanya kemungkinan *back-up* dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Israel dimana Israel adalah musuh lama bagi Suriah dan negara-negara Timur Tengah, yang dapat mengancam keamanan geopolitik di kawasan regional tersebut (Phillips, 2013).

Untuk saat ini, Bashar Al Assad masih menguasai 25% dari wilayah teritori Suriah dengan masih diadakannya kontrol efektif di wilayah-wilayah tersebut (Bremmer, 2015). Namun hal tersebut tidak lantas membuat Bashar Al Assad berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan Suriah melalui solusi politik. Bashar Al Assad lebih memprioritaskan solusi militer untuk melangsungkan kepemimpinannya di Suriah (Krever, 2016). Meskipun demikian, kekuatan militer Suriah masih jauh lebih besar dibanding dengan kekuatan militer aktor-aktor lain sebab persenjataan yang dimiliki Suriah merupakan senjata militer produksi Rusia yang didatangkan melalui kerja sama bilateral di bidang militer antara kedua negara sejak tahun 2000.

Dihimpun dari Global Fire Power dalam indeks peringkat kekuatan militer negara-negara dunia tahun 2017, kekuatan militer Suriah menempati peringkat 43 dari 126 negara dengan populasi sebanyak 17.185.170 jiwa dan jumlah anggota militer mencapai 750.000 personil. Pemerintah Suriah memberikan anggaran untuk pertahanan dan kekuatan militer sebesar USD 1.872.000.000 dan melakukan penambahan jumlah persenjataan militer yang terdiri dari darat, laut dan udara. Untuk darat,

Suriah memiliki 4.640 tank, 461 pesawat tempur, 56 kapal perang, 4.510 Armored Fighting Vehicle (AFV), 436 Self-Propelled Guns (SPG), 2.150 Towed-Artillery dan 650 Multiple-Launch Rocket System ([www.globalfirepower.org](http://www.globalfirepower.org)).

#### **2.4.2. Pemberontak/Oposisi**

Dalam penelitian ini, pemberontak/oposisi yang dimaksud adalah kelompok yang menjadi ancaman utama dan yang paling menonjol bagi pemerintah Bashar Al Assad dimana kelompok tersebut bertujuan untuk menurunkan rezim dari kekuasaan.

##### **2.4.2.1. Free Syrian Army**

Free Syrian Army (FSA) dibentuk pada Agustus 2011. Pertama kali memulai debut sebagai kelompok bersenjata di Kota Jisr Al Shougour dengan melakukan aksi penembakan terhadap tentara Suriah yang mengakibatkan tewasnya 20 anggota (Holiday, 2012). FSA bertujuan untuk melindungi pemrotes dan simpatisannya dari aksi brutal kelompok rezim (Lister, 2016). Sebagai organisasi kelompok bersenjata, pada mulanya FSA mendapatkan alat persenjataannya hasil dari pencurian. Bisa jadi tentara Suriah, bisa jadi kelompok bersenjata lain yang berhasil mereka lumpuhkan. Menyadari akan keterbatasan persenjataan yang dimiliki dibanding dengan tentara Suriah, FSA lebih memfokuskan aksinya sebagai aksi defensif (Holiday, 2012).

FSA yang beranggotakan masyarakat-masyarakat sipil dan pembelot militer Suriah dan diberi dukungan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Qatar sebab FSA mempunyai tujuan untuk melawan dan melengserkan rezim serta membentuk Suriah yang lebih demokratis (Laub, 2013). Kelompok ini mendapatkan dukungan persenjataan dari Amerika Serikat sebesar 500 miliar dollar (Timm, 2015). Meskipun demikian, kelompok ini tidak memiliki kekuatan yang cukup berimbang bila disejajarkan dengan kekuatan militer pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari sifatnya yang cenderung defensif dan perlawanan yang dilakukan pun juga sebatas melalui gerilya.

Menurut Jeffrey White dalam artikelnya yang berjudul “*Assad’s Armed Opposition: The Free Syrian Army*”, tidak ada keterangan secara jelas terkait jumlah perlengkapan militer yang dimiliki oleh FSA. Namun, White mengklaim bahwa persenjataan FSA merupakan jenis senjata yang hanya bisa digunakan untuk perang-perang kecil sehingga hanya mampu untuk melakukan tindakan defensif. Untuk jumlah personil yang dimiliki, hingga saat ini FSA telah memiliki sekitar 20.000 anggota yang terbagi ke dalam 22 batalion dan disebarakan ke seluruh wilayah Suriah.

#### **2.4.2.3. Jabhat Al Nusra**

Berbeda dengan FSA yang terdiri dari pemberontak Suriah, Jabhat Al Nusra dikenal lebih berpengalaman dalam penggunaan senjata. Jabhat Al Nusra merupakan sebuah kelompok ekstremis yang berafiliasi

dengan Al Qaeda Irak (sekarang ISIS)<sup>2</sup>. Namun, Jabhat Al Nusra adalah pecahan dari Al Qaeda Irak yang ada di Suriah (O'Baggy, 2012) dengan Abu Mohammad Al Julani sebagai pemimpin tertinggi ([www.aljazeera.com](http://www.aljazeera.com)).

Organisasi terorisme ini menjadi ancaman yang serius bagi pemerintah Suriah karena selalu melancarkan perlawanan yang provokatif dimana pada tahun 2011 organisasi tersebut melakukan serangan terorisme di Kota Damaskus dan kota-kota lain di Suriah. Kemudian pada tahun 2012, organisasi ini merilis sebuah video yang disebar di internet dengan mengklaim bahwa mereka adalah garis depan kelompok Mujahidin Suriah untuk mendukung pembebasan masyarakat Suriah (Taylor, 2013).

Sama seperti karakter organisasi terorisme pada umumnya, Jabhat Al Nusra mempunyai tujuan untuk menjadikan sebuah negara sebagai negara khalifah yang berbasis keislaman. Khususnya di Suriah, Jabhat Al Nusra juga berupaya untuk menggulingkan rezim Bashar Al Assad sehingga hal tersebut dapat memudahkan mereka untuk membentuk negara dengan hukum syariah Islam ([www.bbc.com](http://www.bbc.com)). Oleh sebab itu, Jabhat Al Nusra secara jelas menolak upaya perundingan yang kerap ditawarkan oleh Pemerintah Suriah.

---

<sup>2</sup> Pada awalnya, Al Qaeda mempunyai cabang di Irak yang biasa disebut dengan Al Qaeda Irak. Namun, dikarenakan oleh adanya pertentangan internal, Al Qaeda Irak mendeklarasikan dirinya untuk lepas dari naungan Al Qaeda yang kemudian dinamakan sebagai Islamic State of Iraq and Sham (ISIS).

Akan tetapi, Jabhat Al Nusra ini dikategorikan sebagai ancaman yang paling berbahaya untuk pemerintah Suriah maupun komunitas internasional. Jabhat Al Nusra masih berafiliasi dengan Al Qaeda yang menjadi musuh utama Amerika Serikat. Selain itu, Jabhat Al Nusra memiliki persenjataan yang lebih lengkap karena organisasi ini juga erat kaitannya dengan kelompok pemberontak Ahrar Al Sham yang didanai oleh Turki, Qatar, dan Arab Saudi. Selain penggulingan rezim, Jabhat Al Nusra juga menargetkan untuk melakukan serangan terorisme di negara-negara Barat dengan menyusup sebagai pengungsi Suriah untuk dapat melancarkan aksi-aksi terorisme di wilayah Eropa dan Amerika Serikat (Ignatius, 2016).

Jumlah dari personil Jabhat Al Nusra sendiri pun memiliki sekitar 10.000 anggota (Luck, 2012) yang mana mempunyai taktik dan strategi yang fleksibel namun agresif seperti peledakan bom bunuh diri dan penyerangan ke markas militer Suriah (Ignatius, 2012). Akan tetapi, belum ada keterangan maupun data secara jelas terkait jumlah persenjataan yang dimiliki oleh Jabhat Al Nusra.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa kekuatan Jabhat Al Nusra memang menjadi perhatian utama bagi pemerintah Suriah maupun negara-negara Barat sebab ancaman-ancaman yang dilakukan oleh organisasi tersebut merupakan ancaman-ancaman nyata yang tidak hanya berdampak pada suatu negara tetapi juga dapat mengganggu kestabilan global.

### **2.4.2.3. Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)**

Isis juga sering disebut sebagai Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) dan Islamic State (IS), merupakan sebuah kelompok terorisme pada umumnya seperti halnya Jabhat Al Nusra, yaitu berakar dari Al Qaeda Irak. Tujuan dari ISIS adalah untuk membentuk negara kekhalifahan Islam di wilayah Irak dan Suriah yang dimungkinkan untuk memperluas diri ke negara-negara Arab lainnya. Hingga tahun 2014, ISIS telah berhasil menguasai sekitar 34.000 mile wilayah Suriah dan Irak ([www.cnn.com](http://www.cnn.com)).

Pada awalnya, ISIS tidak terlibat secara langsung dalam perang saudara di Suriah. ISIS bermain di belakang Jabhat Al Nusra. Namun, belakangan diketahui bahwa ISIS mulai tahun 2013 mulai melibatkan diri secara langsung terhadap konflik di Suriah. Hal tersebut dikarenakan penolakan Jabhat Al Nusra terhadap tawaran ISIS untuk membentuk sebuah kesatuan (Kavalek, 2015).

Pada tahun 2014, ISIS berhasil mengambil Kota Raqqa dari Jabhat Al Nusra dan menjadikannya sebagai ibukota ISIS. Semua administrasi dilakukan di kota tersebut. Kemudian, ISIS mengumumkan kekhalifahannya pada Juni 2014 dilanjutkan dengan penaklukan kota-kota lain di Suriah seperti mosul dan wilayah perbatasan Suriah dan Irak karena wilayah tersebut merupakan ladang minyak yang paling besar di Suriah



(Kavalek, 2015). Tentu saja hal ini menjadikan ancaman bagi pemerintah Suriah.

Meskipun ISIS merupakan organisasi yang cenderung lebih vokal dalam melakukan ancaman, namun popularitas eksistensi ISIS di Suriah tidak sebesar popularitas yang dimiliki oleh Jabhat Al Nusra. Kekuatan ISIS memang cukup besar, namun tidak sampai menyaingi kekuatan Jabhat Al Nusra (Yan, 2015) yang dipayungi oleh Al Qaeda dan kelompok lain yakni Ahrar Al Sham yang didanai oleh negara-negara seperti Turki, Qatar dan Arab Saudi (Ignatius, 2016). Namun, secara ekonomi, ISIS mampu memberikan kerugian besar bagi pemerintah Suriah atas keberhasilannya merebut ladang minyak yang menjadi pemasukan utama Suriah sehingga Suriah hanya kehilangan hingga 42% dari total pemasukan negara sejak tahun 2014 (Hamed, 2016).

Ada beberapa perbedaan terkait jumlah anggota ISIS. Namun menurut Syrian Observatory for Human Rights, di Suriah sendiri, ISIS mempunyai lebih dari 50.000 personil. Sedangkan menurut Pemerintah Rusia, ISIS mempunyai lebih dari 70.000 personil yang tersebar di Suriah dan Irak. Untuk jumlah persenjataan, menurut Julia Harter dan Jeffrey Smith dalam artikelnya yang berjudul "*Where Does The Islamic State Get Its Weapons?*", ISIS mempunyai sekitar 1.700 senjata yang terdiri dari 55 jenis, yang mana senjata-senjata tersebut diperoleh melalui hasil penaklukan terhadap lawan dan penjualan minyak.

## **2.5. Konflik Suriah Berujung pada Konflik Bersenjata**

Konflik Suriah tidak terjadi secara langsung. Konflik tersebut terjadi melalui beberapa fase. Menurut Simon Adams dalam publikasinya yang berjudul *“Failure to Protect: Syria and the UN Security Council”*, setidaknya ada lima fase yang dapat menjelaskan bagaimana konflik muncul dan keberlanjutannya secara berurutan.

Fase pertama, konflik muncul dari protes-protes kecil yang dilakukan oleh murid-murid di Kota Deera pada Bulan Maret 2011 yang kemudian protes-protes itu secara masif menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengatasi protes-protes yang semakin menyebar tersebut, Bashar Al Assad mengerahkan pasukan militer Suriah untuk melakukan tindakan-tindakan represif kepada siapapun yang terlibat dalam pemberontakan tersebut, termasuk juga yang menjadi lawan politik Bashar Al Assad, dengan cara melakukan pembunuhan dan penghilangan paksa terhadap warga sipil hingga Mei 2011.

Fase kedua dari konflik yang terjadi di Suriah adalah pembentukan Free Syrian Army (FSA) yang dimotori oleh warga sipil dan para pembelot yang awalnya merupakan anggota pasukan keamanan Suriah pada Bulan Juli 2011. FSA berhasil menguasai area-area yang lepas dari pengawasan dan kontrol dari rezim pemerintah. Salah satunya dengan keberhasilannya merebut Kota Rastan setelah melalui pertempuran dengan pemerintah. Kemudian, pemerintah mengatur ulang strategi pertahanannya yang dijelaskan di fase berikutnya.

Fase ketiga dari konflik Suriah terjadi pada awal tahun 2012. Pemerintah melepaskan serangan *offensive* dan pengepungan di kota Homs, yang menjadi salah satu kota yang dikuasai oleh kelompok oposisi. Hal ini merupakan strategi Pemerintah Suriah untuk melumpuhkan populasi penduduk Sunni yang dianggap sebagai pendukung mayoritas kelompok oposisi. Strategi Pemerintah Suriah tersebut disebut sebagai Kebijakan Hukuman Kolektif dimana pemerintah melalui kekuatan militernya melakukan penyerangan dan pengepungan di wilayah-wilayah yang menjadi tempat berlindung penduduk sipil termasuk kediaman, sekolah, hingga rumah sakit.

Akan tetapi, pasukan pemberontak yang memiliki peralatan militer yang juga cukup canggih berhasil menguasai bagian utara dan tenggara dari Suriah. Hal tersebut dijadikan sebagai ancaman besar bagi kontrol Pemerintah Suriah yang menyebabkan Pemerintah Suriah terus melakukan penyerangan hingga terlibatlah keduanya dalam suatu perang saudara antara pemerintah dan oposisi.

Fase keempat dari konflik Suriah adalah terjadinya kebuntuan dari kedua belah pihak dimana tidak satu pun dari keduanya yang mampu mengalahkan kekuatan lawan. Kedua pihak juga tidak mampu memaksakan perlawanan yang lebih komprehensif lagi. Artinya, kekuatan dari Pemerintah Suriah dan kelompok oposisi pun berimbang. Hal ini kemudian menyebabkan keduanya memulai untuk meminta bantuan eksternal. Pemerintah mendapat dukungan dari Iran dan Rusia. Sedangkan oposisi mendapat dukungan dari negara-negara Teluk, Amerika Serikat, dan pendonor pribadi lainnya.

Fase kelima adalah ketika konflik sektarian tersebut menciptakan suatu fragmentasi geografis, ekonomi, dan politik. Tidak satupun dari kedua pihak yang benar-benar berhak mendapatkan kedaulatan Suriah secara penuh. Secara geografis, Suriah terbagi menjadi beberapa wilayah yang dikuasai oleh kelompok yang berbeda-beda. Implikasinya adalah distribusi ekonomi dan politik juga menjadi tidak rata. Ekonomi dan politik tidak lagi tersentralisasi sebagaimana Suriah sebelumnya. Pihak yang menguasai wilayah tertentu – melakukan kontrol efektif – dianggap berhak mengelola apa yang didapatkan di wilayah tersebut untuk pembiayaan secara sekuler.

## **2.6. Konflik Suriah sebagai Konflik Bersenjata Internasional**

Fenomena yang terjadi di suatu negara bisa menjadi perhatian dari negara-negara lain. Begitu juga dengan konflik yang terjadi di Suriah. Dimulai dari protes-protes sebagai ketidakpuasan akan kediktatoran rezim hingga memberikan aksi yang lebih besar lagi dimana penggunaan senjata juga diikutsertakan dan memicu terjadinya perang saudara antara kelompok pro pemerintah dengan kelompok oposisi. Konflik yang telah menelan sebanyak 200.000 jiwa dari tahun 2011 tersebut mengundang simpati dari negara-negara lain. Negara-negara memberikan respon terhadap perkembangan konflik tersebut. Salah satunya Amerika Serikat yang mulai aktif memberikan bantuan persenjataan untuk kelompok oposisi sejak tahun 2013 (Laub, 2013).

Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Barrack Obama memberikan bantuan dengan pelatihan militer kepada FSA di Turki dan Yordania guna menjamin keberlangsungan dan membekali ilmu kemiliteran untuk FSA agar siap bertempur di medan perang melawan pasukan militer rezim (Lister, 2016) yang diklaim oleh Tara McKelvey dalam artikelnya yang berjudul “*Arming Syrian Rebels: What The U.S. Went Wrong*” telah menghabiskan kurang lebih US\$ 500 untuk pendanaan FSA. Selain itu, bentuk dukungan lain yang diberikan oleh Amerika Serikat juga berupa penyediaan bahan makanan dan obat-obatan.

Amerika Serikat merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan demokrasi. Alasan-alasan pemberontak untuk menjatuhkan pemerintahan Bashar Al Assad sangat sejalan dengan prinsip demokratisasi Amerika Serikat. Sehingga pada tahun 2014, Amerika Serikat secara terbuka membiayai pelatihan militer untuk 15,000 pemberontak di Yordania untuk mengasah kemampuan menembak dan navigasi pemberontak dengan harapan pemberontak dapat kembali ke Suriah dan siap bertempur (McKelvey, 2015).

Pada tahun 2015, dunia dikejutkan dengan kedatangan pasukan militer Rusia di Suriah. Alasan Rusia dalam penerjunan pasukannya di Suriah tersebut pada awalnya hanya untuk memerangi ISIS dan membantu akselerasi perdamaian di Suriah. Namun yang menjadi perhatian publik adalah Rusia tidak bergabung dengan koalisi yang telah ada sebelumnya yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Sejak tahun 2011, partisipasi Rusia dalam konflik Suriah hanya sebagai pengeksportir persenjataan militer untuk Suriah dimana hal tersebut telah menjadi kesepakatan bilateral antara Rusia dan Suriah di tahun 2000. Selain itu,

partisipasi lain dari Rusia adalah dengan memveto resolusi PBB nomor 2254 yang dianggap merugikan dan mampu menjatuhkan pemerintahan rezim Bashar Al Assad. (Kaim dan Tamminga, 2015).

Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, sebuah konflik bersenjata di suatu negara akan berubah menjadi konflik bersenjata yang terinternasionalisasi apabila ada intervensi negara-negara lain di dalamnya dimana intervensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah intervensi berupa pemberian bantuan secara militer dan persenjataan kepada pihak-pihak berkonflik.

## **2.7. Bentuk Keterlibatan Rusia di Suriah**

Peran Rusia memang melemah di Timur Tengah pasca runtuhnya Uni Soviet. Namun, Rusia tetap menjadi *external player* paling utama bagi Suriah (Klein, 2015). Rusia memberikan kontribusi dalam konflik Suriah sejak tahun 2011 dimana protes-protes terhadap pemerintah Suriah pertama kali muncul. Namun, bentuk kontribusi tersebut hanya sebatas pengekspor logistik, persenjataan militer, dan pemberian bantuan secara politik di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB).

Pada tahun 2011, Rusia bersama dengan Tiongkok memveto resolusi DK PBB tentang pemberian sanksi dan penurunan rezim Bashar Al Assad untuk menekan tindakan rezim dalam merespon aksi pemberontakan dengan menggunakan persenjataan militer yang secara prosedural dianggap menyalahi aturan hukum internasional ([www.theguardian.com](http://www.theguardian.com)). Perwakilan Rusia untuk

PBB, Vitaly Churkin, menegaskan bahwa keputusan Rusia untuk memveto resolusi tersebut untuk memudahkan proses perdamaian internal Suriah dengan mengadakan dialog terbuka antara aktor-aktor yang terlibat dan bertanggung jawab dalam perang saudara di Suriah ([www.un.org](http://www.un.org)). Rusia berasumsi bahwa resolusi tersebut tidak akan mengakselerasi proses perdamaian Suriah (Techau, 2015).

Rusia mulai melibatkan diri secara militer dengan menerjunkan pasukannya di Suriah pada 30 September 2015 dan membentuk markas tentara di Selatan Latakia, Suriah Barat Daya. Dalam keterlibatannya tersebut, Rusia tidak berafiliasi dengan koalisi anti-IS yang dibentuk oleh Amerika Serikat. Rusia lebih memilih untuk berafiliasi dengan Suriah, Irak, Iran, dan kelompok Hizbullah dari Libanon (Kaim dan Tamminga, 2015). Intensitas Rusia dalam memberikan support terhadap Pemerintahan Bashar Al Assad pun semakin meningkat yang ditunjukkan dengan memberikan ekstra pengamanan dalam sistem kontrol udara dan perlengkapan militer canggih lainnya di wilayah Suriah (Techau, 2015).

Pengiriman angkatan militer Rusia di Suriah juga telah dikonfirmasi oleh Presiden Vladimir Putin dalam rangka Rusia memerangi terorisme dan pergerakan kelompok-kelompok ekstremis yang dianggap memberikan peran terhadap perang saudara di Suriah (Oliphant, 2015). Kekuatan militer Rusia yang diturunkan di Suriah pun semakin terlihat dengan penyerangan yang dilakukan oleh angkatan laut Rusia terhadap kelompok oposisi yang ada di wilayah Aleppo dan Idlib. Kapabilitas militer Rusia yang besar ini memberi dampak yang signifikan terhadap jumlah korban perang saudara Suriah (White, 2015).

Dibandingkan dengan serangan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat sejak tahun 2014, serangan yang diciptakan Rusia justru lebih banyak. Amerika Serikat melakukan 5,486 serangan dengan 877 korban, sedangkan Rusia melakukan 15,000 lebih serangan 3,915 korban (Oliphant, 2016).

Rusia membawa kurang lebih 4000 pasukan militer yang terdiri dari *Russian Aerospace Forces, Russian Marine Infantry, Russian Airborne*, pasukan khusus, staff untuk bantuan sipil dan batalion artileri (Oliphant, 2016). Menurut observer, semua serangan yang dilakukan oleh Rusia lebih banyak diluncurkan ke arah oposisi, bukan ISIS seperti yang selama ini menjadi alasan Rusia (Quinn, 2016).

Adapun tiga wilayah Suriah yang menjadi perhatian utama dari Vladimir Putin dan Bashar Al Assad adalah Aleppo dan sekitarnya dimana kontrol pemerintah dirasa kurang efektif di bagian-bagian tersebut kemudian, tiga wilayah provinsi dimana pemberontak Islam telah mendahului kekuasaan dari Idlib, Hama dan Latakia yang menyerang populasi Alawite. Terakhir, Gurun Timur Homs dimana Islamic State telah mendeklarasikan wilayah Palmyram sebagai wilayah kekuasaannya yang tentu akan mengancam keamanan nasional Suriah di bidang ketahanan energi dan infrastruktur (Lund, 2015). Hal tersebut mengakibatkan adanya deprivasi penjualan gas dan minyak Suriah sebanyak 45% dimana ISIS telah berhasil memproduksi gas dan minyak sebanyak 3 juta meter kubik dari keseluruhan produksi Suriah yang biasanya sebanyak 14,8 juta 3 meter kubik (Sayigh, 2015).



Rusia secara jelas memberikan bantuan militernya kepada Rezim Bashar Al Assad dan beranggapan bahwa bantuan militer tersebut bukan untuk membela rezim melainkan untuk menyelamatkan kedaulatan Suriah sebagai negara (Lukyanov, 2016).

Kedatangan Amerika Serikat dan Rusia dalam konflik bersenjata tersebut sama-sama tidak mengakselerasi perdamaian di Suriah. Ketegangan kedua negara tersebut semakin meningkat dimana keduanya memiliki keberpihakan pada pihak-pihak yang saling berseberangan. Amerika Serikat dan sekutunya dengan jelas menyatakan perang terhadap rezim Bashar Al Assad. Sedangkan Rusia justru sebaliknya. Rusia berupaya untuk melindungi Bashar Al Assad dari Amerika Serikat dan sekutunya yang ingin menjatuhkannya. Oleh sebab itu, pada bab berikutnya akan dijelaskan alasan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia untuk melibatkan diri dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suriah melalui analisis teori yang telah dijelaskan di bab sebelumnya.